

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA
KINERJA PEMERINTAH DAERAH
(Studi di Provinsi Maluku Utara)**

Dodik Slamet Pujiono

Fakultas Ekonomi Universitas Jember
oyek99@gmail.com

Hari Sukarno

Fakultas Ekonomi Universitas Jember
harisukarno2003@gmail.com

Novi Puspitasari

Fakultas Ekonomi Universitas Jember
vie_salva@yahoo.co.id

Abstract: *This study aimed to analyze the effect of: (1) internal control system on the local financial management, (2) internal control sistem on the performance of local government, and (3) local financial management on the performance of local government. The population was the leaders and heads of the Finance Department of Local Government in North Maluku Province. The samples were consisted of 80 respondents. Path analysis with Confirmatory Factor Analysis was employed as the method of analysis. The results showed that: (1) internal control sistem significantly affects the local financial management in North Maluku, (2) internal control sistem significantly affects local government performance of North Maluku, and (3) local financial management significantly affects the performance of local government of North Maluku Province.*

Keywords: *Internal Control, Local Finance Management, and Performance of Local Government.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh: (1) sistem pengendalian intern terhadap pengelolaan keuangan daerah, (2) sistem pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah daerah, dan (3) pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah pemimpin dan kepala divisi keuangan Pemerintah Daerah di Maluku Utara. Sampel penelitian ini berjumlah 80 responden. Alat analisis yang digunakan adalah analisis jalur dengan *Confirmatory Factor Analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah di Maluku Utara, (2) sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Maluku Utara, dan (3) pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Maluku Utara.

Kata kunci: Sistem Pengendalian Internal, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Kinerja Pemerintah Daerah

Pendahuluan

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang memberikan predikat opini penilaian wajar, tidak wajar maupun tidak memberi pendapat, lebih sering disebabkan masalah pengelolaan aset. Pada kasus tertentu, ada daerah yang mengalami penurunan opini dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), atau tidak member pendapat (*disclaimer*) yang disebabkan kurang-mampuan mewujudkan tata kelola asset pemerintah daerah secara baik.

Hal ini ditemukan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LK (Laporan Keuangan) Pemprov Maluku Utara tahun 2013 dengan alasan BPK tidak memberikan pendapat atau *disclaimer* terhadap LK pemprov tahun 2013. *Disclaimer* dikarenakan beberapa hal seperti keterbatasan catatan dan data sehingga auditor tidak mendapatkan keyakinan mengenai substansi laporan keuangan atau keyakinan atas kewajaran penyajian akun-akun dalam laporan keuangan.

Salah satunya adalah saldo kas di bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) sebesar Rp. 34,08 milyar. Dari angka tersebut, terdapat sebesar Rp 29,02 miliar berupa sisa belanja tahun 2002 sampai 2012 belum disetor ke kas daerah. BPK menemukan saldo tersebut tidak didukung dengan keberadaan fisik dan catatan yang memadai sehingga tidak dapat di telusuri keberadaannya. Saldo kas di bendahara pengeluaran berupa sisa belanja tersebut dalam CALK (catatan atas laporan keuangan) tidak disajikan saldo yang sebenarnya dan saldo kas dibendahara pengeluaran berupa jasa giro yang belum disetor tidak menyajikan saldo yang sebenarnya. Di sini, pentingnya pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan intern yang meliputi penyajian laporan keuangan sehingga BPK tidak memeberikan penilaian opini *disclaimer*.

Sesuai fakta-fakta terkait penatausahaan yang dikemukakan BPK, tergambar pentingnya peran pengurus barang (bendahara barang) dalam proses penatausahaan karena merekalah ujung tombak pelaksana penatausahaan aset tetap dilapangan. Walaupun penting, terkadang fungsi dan perannya terkesampingkan dibanding bendahara keuangan dalam penatausahaan keuangan. Padahal jika dibandingkan justru nilai likuidasi aset

itu cenderung lebih besar dari jumlah uang yang dikelola pemerintah, sebagaimana sering disampaikan dalam LHPBPK RI terkait masalah aset dalam LKPD. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lamusu (2013) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah secara efektif.

Menurut Dwiyanto (2006) kinerja birokrasi publik di Indonesia dari berbagai studi dan observasi tidak banyak mengalami perbaikan, bahkan menjadi semakin buruk. Sistem Pengendalian Intern yang efektif akan berpengaruh terhadap kinerja (Sarita, 2012). Partisipasi pimpinan dalam penyusunan anggaran, dan adanya kejelasan sasaran anggaran yang akan dilaksanakan, diharapkan dapat berpengaruh terhadap kinerja dengan adanya sistem pengendalian intern yang efektif. Pelaksanaan evaluasi anggaran dan umpan balik yang diperoleh diharapkan menjadi bahan penilaian terhadap keefektifan sistem pengendalian intern sehingga semakin efektif sistem pengendalian intern, maka semakin meningkat pula kinerjanya (Ramandei, 2009). Penelitian Shodiq (2001) serta Boritz dan Jee (2007) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu tidak adanya dukungan terhadap kinerja keuangan daerah.

Menurut Rai (2008: 283) sistem pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarnya. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 pengertian sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Di samping itu, pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut Permendagri No. 4 Tahun 2008 Pedoman Pelaksanaan Review Atas Laporan Keuangan Daerah Pasal 1(10) Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam penciptaan efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

keandalan penyajian keuangan daerah. Berdasarkan pengertian diatas dapat dinyatakan bahwa sistem pengendalian intern merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yang terdiri dari keandalan laporan keuangan, efektif dan efisien.

Pengendalian intern diterapkan untuk mencapai tujuan dan meminimalkan hal-hal yang mungkin terjadi diluar rencana, pengendalian intern juga meningkatkan efisiensi, mencegah timbulnya kerugian atas aktiva, mempertinggi tingkat keandalan data dalam laporan keuangan dan mendorong dipatuhinya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan. Jadi pada dasarnya pengendalian intern merupakan tindakan yang bersifat aktif, karena mencari tindakan perbaikan apabila terjadi hal-hal yang menyimpang dari apa yang ditetapkan. Hal ini, sependapat dengan penelitian Lamusu (2013) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah namun Syarifuddin (2010) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Mardiasmo (2002:121) Sistem Pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi menilai alat ukur material dan nonimaterial. Menurut Whitaker (1995) dalam Adisasmita (2002:121) pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagai suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan (program) sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rangka mewujudkan visidan misi instansi pemerintah.

Pengertian kinerja Pemerintah Daerah menurut Mahsun (2006:25) yaitu: kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Kinerja bagian dari produktivitas kerja, produktivitas berasal dari kata produktif yang artinya sesuatu yang mengandung potensi untuk digali, sehingga produktivitas dapatlah dikatakan sesuatu proses kegiatan yang terstruktur guna menggali potensi yang ada dalam sebuah komoditi.

Pengukuran kinerja berdasarkan indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi) dan indikator kualitas pelayanan. Menurut Mardiasmo (2002:131-132), pengukuran kinerja dengan penilaian 3E (Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas). Menurut Mulyadi (2002: 216) pengertian pengendalian intern yaitu: "Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain, yang di desain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu; 1) Keandalan informasi keuangan, 2). Kepatuhan kepada hukum dan peraturan yang berlaku, 3) Efektifitas dan efisiensi operasi." Sarita (2012) menyatakan sistem pengendalian intern yang efektif akan berpengaruh terhadap kinerja. Pendapat ini juga didukung oleh penelitian Tresnawati (2012) yang menyatakan bahwa pemahaman sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Komponen-komponen dalam Pengendalian Intern seperti lingkungan pengendalian yang baik, akan memberikan kontribusi baik dalam menciptakan suasana kerja sehingga dapat mendorong karyawan untuk meningkatkan kinerjanya.

Pemerintah Daerah harus waspada terhadap segala resiko yang akan dihadapi dengan adanya penaksiran resiko maka karyawan dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam mengantisipasi mengatasi resiko-resiko yang mungkin terjadi. Informasi dan komunikasi akan memberikan dampak baik bagi peningkatan kinerja karena semua karyawan memperoleh dan bertukar informasi yang diperlukan dalam melakukan aktivitas operasional perusahaan. Aktivitas pengendalian akan mendorong karyawan mentaati dan melaksanakan peraturan dan standar kerja yang sudah ditetapkan. Pemantauan yang baik akan membuat karyawan untuk lebih disiplin dalam bekerja.

Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal jika penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu pada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan Pengelolaan keuangan

daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan daerah.”

Penelitian yang dilakukan Syarifudin (2010) menyimpulkan bahwa: 1) Penyebab terjadinya kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota pada umumnya dikarenakan pejabat yang bertanggungjawab lalai, tidak cermat, dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Selain itu, kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggungjawab tidak menaati dan memahami ketentuan yang berlaku serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. 2) Upaya meningkatkan fungsi pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan daerah agar lebih efektif, efisien dan bebas korupsi kemas depan memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh unsur aparat pengawasan intern pemerintah.

Widanarto (2012) menyatakan hasil penelitiannya bahwa pengawasan intern dan pengawasan eksternal secara bersama-sama mempunyai pengaruh cukup kuat terhadap kinerja Pemerintah Kota Bandung. Hubungan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus atau sasaran yang sama-sama membahas tentang kinerja pemerintah daerah. Tresnawati (2012) menyatakan bahwa pengendalian intern mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Penelitian Ristanti dkk (2014) menunjukkan bahwa (1) Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan daerah dan Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Penerapan *Good Governance* (2) Sistem Pengendalian Intern (SPI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerapan *Good Governance*, (3) Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerapan *Good Governance*, (4) Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerapan *Good Governance*. Analisis yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan regresi linear berganda.

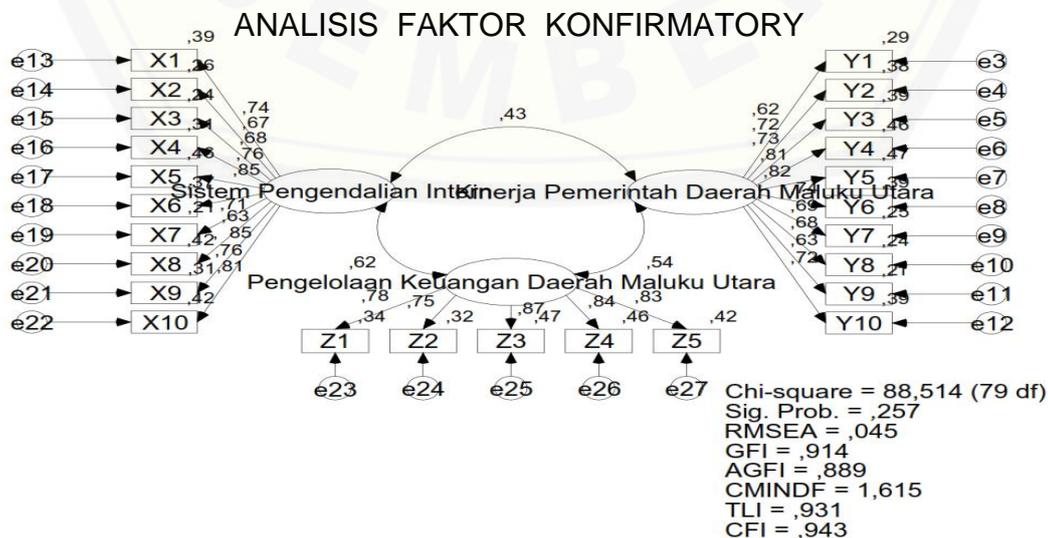
Metodologi

Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme dengan pendekatan kuantitatif karena semua datanya diukur dalam angka yang dapat dihitung, kemudian dianalisis dengan pendekatan statistik. Paradigma positivis mem memandang pengetahuan sebagai pernyataan mengenai keyakinan atau fakta yang dapat diuji secara empiris, dapat dikonfirmasi atau dapat ditolak.

Data ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara dan menyebarkan kuesioner kepada responden. Pada penelitian ini data primer meliputi data hasil penyebaran kuesioner kepada responden. Teknik pengukuran data menggunakan skala likert dengan lima alternative jawaban yaitu : jawaban sangat tidak setuju, bobot 1; jawaban tidak setuju, bobot nilai 2; jawaban netral, bobot nilai 3; jawaban setuju, bobot nilai 4; jawaban sangat setuju, bobot nilai 5. Skala likert adalah skala interval (Indriantoro dan Supomo, 2002:99; Sekaran, 2003:163; Dimiyati, 2011).

Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas seperti disajikan dalam Tabel 5.5 menunjukkan bahwa nilai t (ditunjukkan oleh nilai C.R) untuk loading signifikansi 0,05 (nilai kritis = 1,96), demikian juga nilai probabilitasnya lebih kecil dari α (0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel secara signifikan berhubungan dengan konstruk (semua indikator valid). *Construct reliability* sebesar 0,927, 0,909, dan 0,914, berada diatas nilai yang direkomendasikan yakni minimal sebesar 0,60-0,70 dengan demikian semua indikator atau variabel adalah reliabel.



Gambar 2 Uji Validitas dan Reliabilitas dengan *Confirmatory Factor Analysis*

Setelah dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas pada masing-masing variabel laten, maka dilakukan uji asumsi untuk melihat apakah persyaratan yang diperlukan dalam permodelan dapat dipenuhi. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah asumsi multivariate normal, tidak adanya multikolinieritas atau singularitas dan *outlier*.

Uji Normalitas

Uji normalitas perlu dilakukan baik untuk normalitas terhadap data univariat maupun normalitas *multivariate* dimana beberapa variabel yang digunakan sekaligus dalam analisis akhir. Hasil pengujian normalitas atau *assessment of normality* (CR) (lampiran 4) memberikan nilai CR sebesar 1,708 terletak diantara -1,96 ($-1,96 \leq 1,708 \leq 1,96$ ($\alpha = 0,05$), sehingga dapat dikatakan bahwa data bersifat multivariate normal. Selain itu juga data bersifat univariat normal juga ditunjukkan oleh semua nilai *critical ratio* semua indikator diantara -1,96 ($-1,96 \leq CR \leq 1,96$ ($\alpha = 0,05$).

Uji Multikolinieritas

Hasil pengujian memberikan nilai *determinant of sample covariance matrix* sebesar 25,246. Nilai ini jauh dari angka nol sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak terdapat masalah multikolinieritas dan singularitas pada data yang dianalisis, sehingga data dapat dilanjutkan sebagai data dalam penelitian ini.

Uji Outliers

Hasil uji *outliers* pada penelitian dapat dilihat pada *mahalanobis distance* atau *mahalanobis d-squared* (lampiran 4). Untuk menghitung nilai *mahalanobis distance* berdasarkan nilai *Chi Square* pada derajat bebas (jumlah variabel indikator dan variabel) pada tingkat signifikansi 0,05 adalah sebesar 41,33714 (berdasarkan Tabel distribusi X^2 df 28). Hasil uji outlier menunjukkan tidak ada satupun kasus yang memiliki nilai *Mahalanobis distance* lebih besar dari 41,33714, maka dapat disimpulkan tidak ada *multivariate outlier* dalam penelitian.

Uji Kesesuaian Model (*Goodness-Of-Fit Test*)

Pengujian model pada regresi konfirmatori bertujuan untuk melihat kesesuaian model, hasil pengujian kesesuaian model dalam studi ini, menunjukkan bahwa dari delapan kriteria yang digunakan untuk menilai layak atau tidaknya suatu model, hanya ada dua kriteria yang dinyatakan marginal,

tetapi secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kesesuaian model baik dan dapat diterima yang berarti ada kesesuaian antara model dengan data.

Uji Kausalitas

Hasil pengujian kausalitas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1 Hasil Pengujian Kausalitas

Variabel			Koefisien Jalur	CR	Probabilitas	Keterangan
X	*	Z	0,421	3,317	0,001	Signifikan
X	*	Y	0,314	2,880	0,008	Signifikan
Z	*	Y	0,383	3,262	0,004	Signifikan

Sumber :data diolah

Berdasarkan hasil pengujian koefisien jalur pada Tabel 3 ;

$$Z = 0,421X$$

$$Y = 0,314X + 0,383Z$$

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah di Maluku Utara. Hal ini terlihat dari koefisien jalur positif sebesar 0,421 atau 42.1%. Penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang ada di Maluku Utara, membuktikan bahwa Pimpinan dan Kepala Bagian Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Maluku Utara dalam bekerja dirasa telah menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan etika baik kepada sesama maupun terhadap pimpinan dinas yang ada sehingga menjadikan koordinasi dalam pengelolaan keuangan yang ada dapat lebih efisien.

Dalam hal penganggaran untuk kegiatan dinas dan aktivitas kerja yang ada di Maluku Utara, pimpinan dan kepala bagian keuangan SKPD yang ada harus berkomitmen terhadap kompetensi yang dimiliki dan tetap berusaha mencurahkan segala potensi untuk mengerjakan pekerjaannya dan hal tersebut menjadikan pegawai SKPD yang ada lebih cermat dan berhati-hati serta hemat dalam mengeluarkan anggaran keuangan yang sedang dibahas atau direncanakan untuk suatu aktivitas atau proyek yang ada.

Sistem pengendalian intern yang telah diterapkan juga memiliki fungsi dalam memvalidasi setiap transaksi dalam pengelolaan keuangan daerah yang mana dalam transaksi yang ada akan disertakan dengan bukti-bukti yang valid dan sah dan hal ini sangat berguna untuk menciptakan sebuah transparansi dan tanggung jawab yang sesuai dengan pelaksanaan dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern. Pada saat dilakukannya

pengeluaran anggaran untuk sebuah aktivitas kerja yang ada di Maluku Utara, pimpinan dan kepala bagian keuangan SKPD yang ada di Maluku Utara dalam proses kerjanya selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh sistem pengelolaan yang telah diajukan sehingga hal ini akan membentuk perencanaan keuangan dan program pemerintah yang lebih efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan.

Pimpinan dan kepala bagian keuangan SKPD yang ada juga telah berusaha melakukan pemisahan fungsi yang jelas antara fungsi operasi, administrasi dan pengelolaan keuangan dalam instansinya, dan kegiatan pemisahan fungsi yang ada akan memberikan keteraturan terhadap pengelolaan keuangan daerah di Maluku Utara dan penyajian laporan keuangan daerah yang lebih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Maluku Utara.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Maluku Utara. Hal ini terlihat dari koefisien jalur positif sebesar 0,314 atau 31,4%. Ini membuktikan bahwa Sistem Pengendalian Intern telah dilakukan oleh pimpinan dan kepala bagian keuangan SKPD di wilayah Maluku Utara. Selain itu pengendalian intern yang dilaksanakan di Maluku Utara menunjukkan bahwa setiap SKPD yang ada diwajibkan untuk memberikan dan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara teratur dan keteraturan yang ada akan memberikan efektifitas terhadap kinerja keuangan daerah yang ada di Maluku Utara sebagai cerminan dari keberhasilan yang telah dilakukan oleh pegawai SKPD yang ada di Maluku Utara, selain itu sistem pengendalian yang baik juga akan memberikan dampak yang baik terhadap penganggaran yang direncanakan dan dilaksanakan sehingga program dan kegiatan kerja yang dilaksanakan di Maluku Utara dapat dilaksanakan secara lebih efektif dalam hal penganggaran yang telah dilakukan. Sistem pengendalian intern yang ada juga harus dilakukan secara baik, berhati-hati dan menekankan pada penghematan anggaran yang ada di Maluku Utara, dan kegiatan yang ada telah memberikan efisiensi pengelolaan keuangan yang akan memberikan kontribusi terhadap

penghematan keuangan atau anggaran yang dilakukan untuk sesuatu proses kerja atau program kerja tertentu yang ada di Maluku Utara, selain itu kehati-hatian yang ada juga memberikan efek yang baik dalam menjaga pribadi atau pegawai SKPD yang ada di Maluku Utara karena kehati-hatian yang ada akan mampu dipertanggungjawabkan atas apa yang telah dilakukan dan ditimbulkan dari adanya kebijakan atas sebuah program kerja atau penganggaran yang telah dilakukan di Maluku Utara.

Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Maluku Utara. Hal ini terlihat dari koefisien jalur positif sebesar 0,383 atau 38.3%. Ini membuktikan bahwa pengelolaan keuangan yang telah dilakukan oleh perangkat kerja di wilayah Maluku Utara dengan mengikuti berbagai ketentuan yang ada didalam aturan kedinasan didalam menentukan kebijakan dan penggunaan anggaran yang ada di wilayah Maluku Utara menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh perangkat atau satuan kerja di wilayah Maluku Utara, membuktikan bahwa pimpinan dan kepala bagian keuangan SKPD yang ada telah dapat menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara teratur sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku di pemerintahan, dan hal ini memperjelas pencapaian kinerja dari masing-masing unit kerja yang bertanggung jawab atas suatu kegiatan yang telah diproyekkan dan dilaksanakan di Maluku Utara. Pegawai SKPD yang ada juga telah merencanakan program pemerintah secara efektif dalam pelaksanaan dan kegiatan yang membutuhkan penganggaran dalam pembiayaan proyek yang sedang dilaksanakan sehingga penganggaran yang ada akan dapat dianggarkan dan dilaksanakan dengan baik dan jelas, selain itu akan memberikan manfaat kepada pegawai SKPD yang telah diberikan sebuah tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, petugas SKPD yang ada akan lebih terjamin dari adanya sanksi yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku dalam pemerintahan serta memberikan transparansi atas biaya anggaran telah dikeluarkan untuk kepentingan organisasi dan kepentingan publik atau

masyarakat yang ada di Maluku Utara.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ;

- a. Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah di Maluku Utara. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya sistem pengendalian intern yang sesuai dengan tujuan dalam memajukan pembangunan daerah maka akan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Maluku Utara. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya sistem pengendalian intern yang sesuai dengan penerapan aturan kerja yang ada maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah;
- c. Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Maluku Utara. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya pengelolaan keuangan daerah yang direncanakan, dilaporkan, diawasi dan dipertanggungjawabkan maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka dapat disarankan ;

- a. Pihak Pemerintah Maluku Utara dihimbau tetap dapat mengevaluasi dan meningkatkan sistem pengendalian internnya dalam melakukan pengalokasian dana anggaran yang sesuai, dengan cara melakukan pengawasan dan kontrol terhadap proyek yang sedang diajukan, meningkatkan pegawai atau staf ahli dalam bidang keuangan, dan memperbaiki prosedur sistem pengendalian intern secara keseluruhan;
- b. Pihak Pemerintah di Maluku Utara dihimbau tetap meningkatkan dan mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah yang berhubungan dengan berbagai pengajuan berbagai anggaran dan alokasi dana untuk pelaksanaan proyek atau tender proyek dan kepentingan dari masyarakatnya.

Daftar Referensi

- Adisasmita.H.R. 2002.*Pembangunan dan Tata Ruang*.Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Kepres Nno 74 Tahun 2001 Tentang *Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.
- Lamusu, Lusiana. 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada DPPKAD Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Akuntansi*, Universitas negeri Gorontalo.
- Mahsun, M., 2006, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: BPFE, Maluku Post, hari senin 12/07/2014.
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol. 2 No. 1, Hal.1-17.
- Mardiasmo.2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi, Yogyakarta.
- Dimiyati, Mohamad 2011. "Theoretical Testing On Service Quality And Product Innovation Of Small-Micro Credit Banks (A Case Study)". *Jurnal Of Economics, Business, & Accountancy* Vol. 14,No.3 Desember 2011 : 225-238.
- Mulyadi, 2002.*Auditing .Buku Dua, Edisi Ke Enam, Salemba Empat, Jakarta*.
- PP No. 24 tahun 2004 tentang *Sistem Akuntansi Pemerintah*.
- PP No. 52 tahun 2004 tentang *Sistem Informasi Keuangan Daerah*.
- PP No.58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- PP No.105 Tahun 2000 tentang *Pengelolaan Dan Opertanggungjawaban Keuangan*.
- PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Rai, Gusti Agung. 2008. *Audit Kinerja Pada Sektor Publik: Konsep, Praktik, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sarita, P.D. 2012. *Pengaruh Pengendalian Internal dan gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan SPBU Yogyakarta (Studi Kasus pada SPBU Anak cabang Perusahaan RB.Group)*. *Jurnal Nasional* 1(1): 1-22.
- Syarifudin, Yan S.H. (2010) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Untuk Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien Dan

Bebas Korupsi. *Jurnal Univertas Tanjung Pura*.Vol 3 No.5 (2013).ISSN 0216/2091.

Shodiq, 2001 dengan judul *penelitian pengaruh sistem kontrol terhadap kinerja keuangan: uji fit versus uji internal onsistency*. Tesis Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Tresnawati, Rina, 2012. Pengaruh Efektifitas Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.*Forum Bisnis dan Keuangan I*. ISBN 978-602-17225-0-3. Hal 139 – 151.

UU No.1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*.

UU No.15 tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung jawab Keuangan Negara*.

UU No.17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.

UU No.32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Widanarto, A 2012. Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal Dan Kinerja Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JIAN)* Universitas Riau.